

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 132.01.1.694776/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (132) | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (694776) | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 230.000.000.000 | (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	230.000.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA VI | (175) Rp. | 230.000.000.000 |
|--------------------|-----------|-----------------|

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

JAKARTA, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

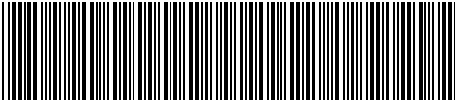
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025

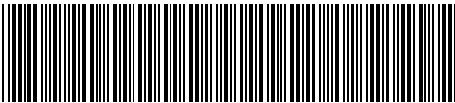


DS:3164-4401-4903-2725

Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp.	52.440.658.000
CL.7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Rp.	13.110.165.000
CL.7391	Koordinasi Konektivitas	Rp.	13.110.165.000
CL.7392	Koordinasi Infrastruktur Dasar	Rp.	13.110.164.000
CL.7393	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rp.	13.110.164.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	177.559.342.000
WA.7394	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Rp.	177.559.342.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA

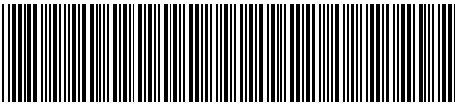


DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Program	:	132.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan			52.440.658.000
Kegiatan	:	7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang			13.110.165.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Dihasilkan			
	:	2. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan			
	:	3. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Dihasilkan			
	:	4. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Dihasilkan			
	:	5. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal yang Dihasilkan			
	:	6. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7390.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	21,00	Rekomendasi Kebijakan	13.110.165.000
Rincian Output	:	01	ABP.001 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	:	02	ABP.002 Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	:	03	ABP.003 Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	:	04	ABP.004 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	:	05	ABP.005 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	:	06	ABP.006 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1.00	Rekomendasi Kebijakan	710.165.000
Kegiatan	:	7391	Koordinasi Konektivitas			13.110.165.000
	:	1. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Konektivitas Berkelanjutan yang dihasilkan			
	:	2. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Konektivitas Darat dan Perkeretaapian yang dihasilkan			
	:	3. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Konektivitas Maritim dan Udara yang dihasilkan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA

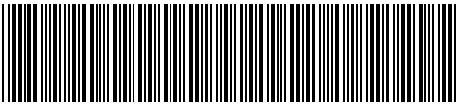


DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Koordinasi Konektivitas						
	4.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah yang Dihasilkan			
	5.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Konektivitas yang dihasilkan			
	6.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7391.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		13.110.165.000
			21,00	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen		
Rincian Output		:	01	ABT.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah	2.480.000.000
			02	ABT.002	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Darat dan Perkeretaapian	2.480.000.000
			03	ABT.003	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Maritim dan Udara	2.480.000.000
			04	ABT.004	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Berkelanjutan	2.480.000.000
			05	ABT.005	Rekomendasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas	2.480.000.000
			06	ABT.006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Konektivitas	710.165.000
Kegiatan		:	7392	Koordinasi Infrastruktur Dasar		13.110.164.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Dasar Strategis yang dihasilkan	
			2.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang dihasilkan	
			3.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan yang dihasilkan	
			4.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Umum dan Sosial yang dihasilkan	
			5.	01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang dihasilkan	
			6.	04	Jumlah Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang dihasilkan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7392.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		13.110.164.000
			21,00	Rekomendasi Kebijakan		
Rincian Output		:	01	ABF.001	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar Strategis	2.480.000.000
			4,00	Rekomendasi Kebijakan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA

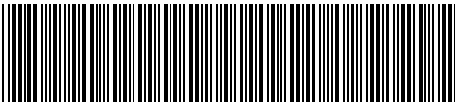


DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan		
	02	ABF.002	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Umum dan Sosial	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	03	ABF.003	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	04	ABF.004	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	05	ABF.005	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dan Industri	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
	06	ABF.006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar	1.00	Rekomendasi Kebijakan	710.164.000
Kegiatan	:	7393	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman			13.110.164.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang Dihasilkan			
		2. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Dihasilkan			
		3. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang Dihasilkan			
		4. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Akses Perumahan yang Dihasilkan			
		5. 01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Penyediaan Lahan Perumahan yang Dihasilkan			
		6. 06	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	4 :	7393.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	13.110.164.000
Rincian Output	:	01	ABT.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
		02	ABT.002 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Lahan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
		03	ABT.003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
		04	ABT.004 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000
		05	ABT.005 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.480.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA

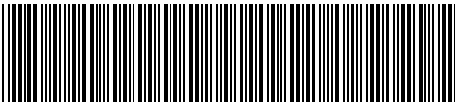


DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan				Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen		
06	ABT.006	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan		710.164.000
Program	: 132.01.WA	Program Dukungan Manajemen				177.559.342.000
Kegiatan	: 7394	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan				177.559.342.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)				
	2. 01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
	3. 01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART)				
	4. 01	Opini BPK Atas Laporan Keuangan				
	5. 01	Predikat Indeks Reformasi Hukum				
	6. 02	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian				
	7. 02	Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian Koordinator				
	8. 02	Persentase Opini Publik yang Positif				
	9. 02	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan dan Keprotokolan				
	10. 03	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Layanan Pengadaan				
	11. 04	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
	12. 05	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)				
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7394.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data		800.000.000
Rincian Output	: 01 BMA.126	Layanan Data dan Informasi Publik	1.00	dokumen		800.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA

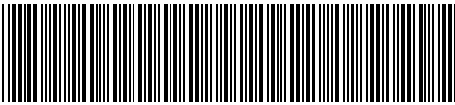


DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Klasifikasi Rincian Output	2	:	7394.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	200.000.000
Rincian Output		:	01	CAN.141 Perangkat Lunak	1.00	Unit	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7394.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	159.567.104.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	3.00	Layanan	417.000.000
		:	02	EBA.957 Layanan Hukum	5.00	Layanan	2.500.000.000
		:	03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.00	Layanan	1.000.000.000
		:	04	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	2.100.000.000
		:	05	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	2.548.000.000
		:	06	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	31.741.209.000
		:	07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	119.260.895.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7394.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	68,00	Unit, m2, Paket	7.017.595.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	67.00	Unit	1.017.595.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	6.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7394.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.027,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	677.00	Layanan	1.000.000.000
		:	02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	350.00	Layanan	1.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
Unit Organisasi : (01) KEWILAYAHAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

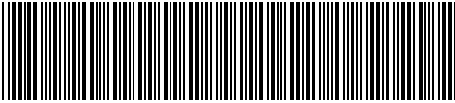
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7394.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	39,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.974.643.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.00	Dokumen	144.000.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16.00	Dokumen	3.092.000.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	2.000.000.000
		04	EBD.965	Layanan Audit Internal	2.00	Dokumen	2.400.000.000
		05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.00	Dokumen	338.643.000

JAKARTA, 02 Desember 2024

a.n. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

ttd.
Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 196611181993071001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025



DS:3164-4401-4903-2725

I B. SUMBER DANA

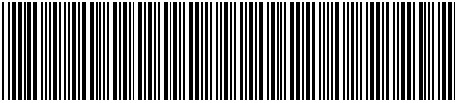
Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	230.000.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	230.000.000.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



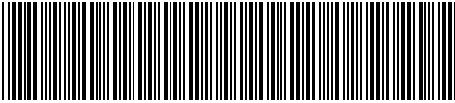
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
694776	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	71.721.368	151.261.037	7.017.595	-	-	230.000.000	01 . 51	
132.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	52.440.658	-	-	-	52.440.658		
7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
7390.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
01 RM		-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
7391	Koordinasi Konektivitas	-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
7391.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
01 RM		-	13.110.165	-	-	-	13.110.165		
7392	Koordinasi Infrastruktur Dasar	-	13.110.164	-	-	-	13.110.164		
7392.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.110.164	-	-	-	13.110.164		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



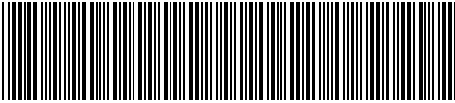
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	13.110.164	-	-	-	13.110.164	175@	
7393	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	-	13.110.164	-	-	-	13.110.164		
7393.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.110.164	-	-	-	13.110.164	01 . 51	
01 RM		-	13.110.164	-	-	-	13.110.164	175@	
132.01.WA	Program Dukungan Manajemen	71.721.368	98.820.379	7.017.595	-	-	177.559.342		
7394	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	71.721.368	98.820.379	7.017.595	-	-	177.559.342		
7394.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	800.000	-	-	-	800.000	01 . 51	
01 RM		-	800.000	-	-	-	800.000	175@	
7394.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	200.000	-	-	-	200.000	01 . 51	
01 RM		-	200.000	-	-	-	200.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3164-4401-4903-2725

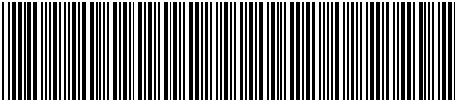
Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
7394.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	71.721.368	87.845.736	-	-	-	159.567.104	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		71.721.368	87.845.736	-	-	-	159.567.104	175@	
7394.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	7.017.595	-	-	7.017.595	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	-	7.017.595	-	-	7.017.595	175@	
7394.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	175@	
7394.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	7.974.643	-	-	-	7.974.643	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01 RM		-	7.974.643	-	-	-	7.974.643	175@	
JUMLAH		71.721.368	151.261.037	7.017.595	-	-	230.000.000		

JAKARTA, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

ttd.
Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 196611181993071001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



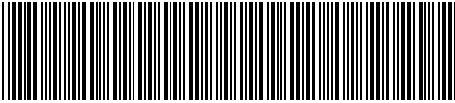
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	694776	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.165.047	19.184.483	230.000.000
		BELANJA PEGAWAI	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.942	71.721.368
		BELANJA BARANG	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.603.487	12.622.680	151.261.037
		BELANJA MODAL	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.861	7.017.595
		132.01.CL.7390 Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.437	13.110.165
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.437	13.110.165
		132.01.CL.7391 Koordinasi Konektivitas	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.437	13.110.165
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.437	13.110.165
		132.01.CL.7392 Koordinasi Infrastruktur Dasar	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.436	13.110.164
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.436	13.110.164
		132.01.CL.7393 Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.436	13.110.164
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.092.248	1.095.436	13.110.164
		132.01.WA.7394 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.796.055	14.802.737	177.559.342

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : (132) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694776) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

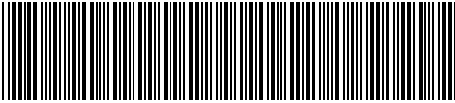
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kewilayahan													
		51 BELANJA PEGAWAI	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.766	5.976.942	71.721.368
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.234.495	8.240.934	98.820.379
		53 BELANJA MODAL	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.794	584.861	7.017.595

JAKARTA, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

ttd.
Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 196611181993071001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV A. B L O K I R



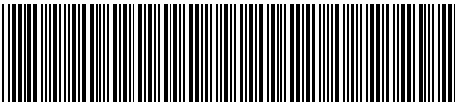
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
694776	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	7391	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.564.830
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 110.739.105		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	52 Belanja Barang Rp. 103.721.510		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	53 Belanja Modal Rp. 7.017.595		Koordinasi Konektivitas
132.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	7391.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		521211 Belanja Bahan(RM)
7390.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.059.596
	521211 Belanja Bahan(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.059.596		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		522141 Belanja Sewa(RM)
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.876
	522141 Belanja Sewa(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.876		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 831.600
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 831.600		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.897.623
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.897.623		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.751.640
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.751.640		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.564.830
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV A. B L O K I R



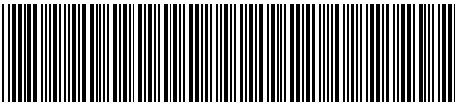
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7392	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	7393.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
7392.ABF	Koordinasi Infrastruktur Dasar	521211	Belanja Bahan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.059.595
			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
521211	Belanja Bahan(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.059.595	522141	Belanja Sewa(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.876
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
522141	Belanja Sewa(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.876	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 831.600
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 831.600	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.897.623
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.897.623	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.751.640
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.751.640	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.564.830
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.564.830	132.01.WA	Program Dukungan Manajemen
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR	7394	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			
7393	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV A. B L O K I R



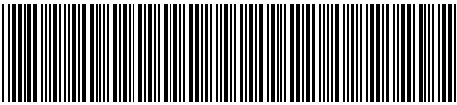
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7394.BMA	Data dan Informasi Publik	7394.EBA	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	521211 Belanja Bahan(RM)		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.162		521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.430
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.200		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.440.000
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.338		521211 Belanja Bahan(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.705.913
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
7394.CAN	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 159.240		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.200
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 387.060		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 417.419
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 103.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.738.200
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.649.800
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV A. B L O K I R



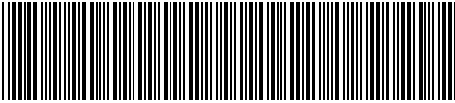
DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7394.EBB	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	7394.EBC	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 703.717		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000.000
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Layanan Manajemen SDM Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.245.710		521211 Belanja Bahan(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 499.321
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.290		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158.400
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.298.931		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 446.933
7394.EBB	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.177.034		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.556
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.122.565		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.870
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
7394.EBB	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.017.595		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 198.920
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV A. B L O K I R



DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

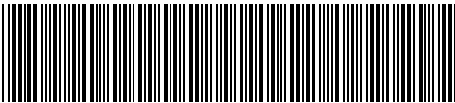
Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7394.EBD	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.390.751		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 977.600		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 923.380		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 323.000		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.119.648		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040.264		
	Belum dilengkapi persetujuan komisi/banggar DPR		

JAKARTA, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

ttd.
Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 196611181993071001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 132.01.1.694776/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3164-4401-4903-2725

Kementerian Negara/Lembaga : [132] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [694776] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

ttd.
Ayodhia G. L. Kalake
NIP. 196611181993071001